



Implementasi Kurikulum Merdeka Bagi Siswa di SD Inpres Jagebob IX Kabupaten Merauke

Lukman Hakim Candra ¹, Syahrabudin Husein Enala ²

^{1,2} Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Email: lukmanhakim@gmail.com¹, syahrabudinhuseinenala@unmus.ac.id²

Received: 10-01-2026

Accepted: 22-03-2026

Published: 29-03-2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas Pelayanan di Kantor Kampung Harapan Makmur. Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan, lokasi penelitian di Kampung harapan makmur Distrik Kurik Kabupaten Merauke. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknis analisis data menggunakan sumber menurut Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 informan. hasil penelitian. Berdasarkan pembahasan mengenai tiga dimensi pelayanan publik tangible (berwujud), reliability (kehandalan), dan responsiveness (ketanggapan) dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik di Kampung Harapan Makmur telah menunjukkan upaya nyata untuk memenuhi ekspektasi masyarakat, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Dari sisi *tangible*, ketersediaan papan informasi sudah cukup baik secara fisik, namun belum sepenuhnya efektif dalam menyampaikan pesan secara jelas dan inklusif. Dari aspek *reliability*, komitmen pelayanan yang tepat waktu dan sesuai prosedur memang terlihat, tetapi belum merata dan masih terdapat keluhan terkait ketidakkonsistenan. Sedangkan dalam hal *responsiveness*, aparat kampung telah menunjukkan niat baik untuk tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, namun konsistensi dalam merespons keluhan dan kebutuhan warga masih perlu ditingkatkan.

Kata Kunci : Efektivitas, Pelayanan Publik, Aparatur kampung.

Abstract

This study aims to describe the effectiveness of Services at the Harapan Makmur Village Office. This study was conducted for approximately 3 months, the location of the study was in Harapan Makmur Village, Kurik District, Merauke Regency. The method used in this study is descriptive qualitative with data analysis techniques using sources according to Miles and Huberman, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The number of informants in this study was 10 informants. research results. Based on the discussion of the three dimensions of tangible public service, reliability, and responsiveness, it can be concluded that public services in Harapan Makmur Village have shown real efforts to meet community expectations, although their implementation still faces various challenges. In terms of tangible, the availability of information boards is quite good physically, but not yet fully effective in conveying messages clearly and inclusively. From the aspect of reliability, the commitment to timely and procedural services is indeed visible, but it is not evenly distributed and there are still complaints regarding inconsistency. Meanwhile, in terms of responsiveness, village officials have shown good intentions to respond to community needs, but consistency in responding to complaints and needs of residents still needs to be improved.

Keywords : Effectiveness, Public Service, Village Apparatus.

PENDAHULUAN

Implementasi merupakan konsep yang berasal dari bahasa Inggris *to implement* yang berarti melaksanakan atau menerapkan suatu kebijakan atau program yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam konteks administrasi publik, implementasi tidak hanya dipahami sebagai tindakan teknis semata, tetapi sebagai proses yang kompleks yang melibatkan berbagai aktor, sumber daya, serta kondisi lingkungan yang memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Implementasi menjadi tahapan krusial dalam siklus kebijakan publik karena pada fase inilah suatu kebijakan diuji efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa implementasi yang baik, kebijakan yang dirancang secara ideal sekalipun tidak akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik dapat dipandang sebagai jembatan antara perencanaan dan hasil yang diharapkan, yang menuntut adanya koordinasi, komitmen, serta kemampuan adaptasi dari para pelaksana kebijakan. Dalam praktiknya, implementasi mencakup berbagai bentuk tindakan konkret yang dilakukan untuk merealisasikan program, proyek, dan kegiatan yang telah dirancang, baik melalui pendekatan langsung maupun melalui kebijakan turunan yang lebih operasional. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan, bukan hanya bagaimana kebijakan itu dirumuskan.

Kebijakan publik sendiri memiliki makna yang luas dan kompleks. Secara umum, kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian keputusan yang dibuat oleh aktor tertentu untuk mencapai tujuan tertentu, dengan mempertimbangkan berbagai alternatif tindakan yang tersedia. Dalam pengertian khusus, kebijakan mencerminkan pilihan strategis mengenai tujuan dan cara untuk mencapainya. Menurut pandangan para ahli, kebijakan publik melibatkan tiga unsur utama, yaitu aktor kebijakan, konteks kebijakan, dan substansi kebijakan itu sendiri. Aktor kebijakan mencakup berbagai pihak yang terlibat, seperti pemerintah, lembaga legislatif, kelompok masyarakat, hingga akademisi. Konteks kebijakan merujuk pada kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang memengaruhi proses perumusan dan implementasi kebijakan. Sementara itu, substansi kebijakan berkaitan dengan isi atau materi kebijakan yang dihasilkan. Ketiga unsur ini saling berinteraksi secara dinamis dan membentuk suatu sistem kebijakan yang kompleks. Dengan demikian, implementasi kebijakan tidak dapat dipisahkan dari konteks dan aktor yang terlibat di dalamnya, karena setiap kebijakan pada dasarnya merupakan hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan dan kondisi yang ada.

Dalam sektor pendidikan, implementasi kebijakan memiliki peran yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu sektor utama dalam pembangunan nasional, karena melalui pendidikan kualitas manusia dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Salah satu instrumen penting dalam sistem pendidikan adalah kurikulum, yang berfungsi

sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Kurikulum tidak hanya mengatur materi pembelajaran, tetapi juga mencerminkan arah dan tujuan pendidikan suatu negara. Oleh karena itu, perubahan kurikulum menjadi hal yang tidak terhindarkan seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Di Indonesia, kurikulum telah mengalami berbagai perubahan sejak tahun 1947 hingga saat ini, yang menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Perubahan tersebut tidak hanya bertujuan untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya, tetapi juga untuk menyesuaikan dengan perkembangan global serta tuntutan kompetensi abad ke-21.

Kurikulum memiliki peran yang sangat vital dalam sistem pendidikan, sehingga sering dianalogikan sebagai “jantung” dalam tubuh manusia. Apabila kurikulum dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sebaliknya, apabila kurikulum tidak mampu menjawab kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman, maka tujuan pendidikan sulit untuk dicapai. Oleh karena itu, evaluasi dan pembaruan kurikulum menjadi suatu keharusan dalam sistem pendidikan yang dinamis. Kurikulum harus mampu beradaptasi dengan karakteristik peserta didik, kondisi lingkungan, serta kebutuhan pembangunan nasional. Selain itu, kurikulum juga harus tetap berlandaskan pada nilai-nilai dasar bangsa, seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, agar mampu membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat.

Salah satu bentuk inovasi kebijakan pendidikan di Indonesia adalah penerapan Kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum ini diperkenalkan sebagai respons terhadap berbagai tantangan dalam dunia pendidikan, terutama yang muncul akibat perubahan global dan dampak pandemi. Kurikulum Merdeka Belajar menekankan pada fleksibilitas, kemandirian, serta pengembangan karakter peserta didik. Konsep ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya kebebasan dalam belajar agar peserta didik dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dalam implementasinya, Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan bagi sekolah dan guru untuk merancang proses pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan siswa. Selain itu, kurikulum ini juga menekankan pada pengembangan kompetensi esensial, seperti literasi, numerasi, serta karakter melalui program Profil Pelajar Pancasila.

Kebijakan Merdeka Belajar juga membawa sejumlah perubahan signifikan dalam sistem pendidikan, seperti penggantian Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), serta fleksibilitas dalam penerimaan peserta didik baru. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adaptif dan berorientasi pada pengembangan potensi siswa secara menyeluruh.

Namun demikian, implementasi Kurikulum Merdeka tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesiapan guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Selain itu, keterbatasan fasilitas dan sarana pendukung juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kurikulum ini.

Kondisi tersebut dapat dilihat pada perbedaan antara sekolah yang memiliki sumber daya memadai dengan sekolah yang berada di daerah terpencil. Sebagai contoh, terdapat sekolah yang berhasil mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dengan baik karena didukung oleh fasilitas lengkap dan tenaga pendidik yang kompeten. Di sisi lain, terdapat pula sekolah yang masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu contohnya adalah SD Inpres Jagebob IX yang berada di Kabupaten Merauke. Sekolah ini telah mulai menerapkan Kurikulum Merdeka sejak tahun 2023, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari segi jumlah guru, kualitas tenaga pengajar, maupun fasilitas pendukung pembelajaran. Jumlah guru yang terbatas serta kondisi sarana prasarana yang belum memadai menjadi hambatan utama dalam implementasi kurikulum tersebut.

Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat juga turut memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan. Sebagian besar orang tua siswa di wilayah tersebut bekerja sebagai petani dengan pendapatan yang tidak menentu, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran yang memerlukan biaya tambahan. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan proyek pembelajaran yang membutuhkan bahan tertentu yang sulit diperoleh di daerah tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan tidak hanya bergantung pada sekolah, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di SD Inpres Jagebob IX masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu dikaji lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar di sekolah tersebut, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah dengan keterbatasan sumber daya, serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan pihak terkait dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar terhadap siswa di SD Inpres Jagebob IX. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Kurikulum Merdeka Belajar di sekolah tersebut. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu

pengetahuan di bidang administrasi publik dan kebijakan pendidikan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak sekolah dan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran serta mengatasi berbagai kendala dalam implementasi Kurikulum Merdeka Belajar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar di SD Inpres Jagebob IX melalui pengumpulan data berupa informasi lisan dan tertulis dari para informan serta hasil pengamatan langsung di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial secara holistik, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli bahwa penelitian kualitatif berfokus pada interaksi manusia dalam lingkungan alamiah serta interpretasi makna dari sudut pandang informan. Penelitian dilaksanakan di SD Inpres Jagebob IX yang berlokasi di Jalan Garuda, Kampung Jagebob Raya, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, dengan waktu pelaksanaan dari Agustus hingga November 2024. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 20 orang yang meliputi kepala sekolah, guru, kepala kurikulum, pengawas, serta orang tua/wali siswa, yang dibagi menjadi informan utama dan pendukung. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, dokumen resmi, dan sumber relevan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi untuk mengamati kondisi nyata di lapangan, wawancara semi terstruktur guna menggali informasi secara mendalam dan fleksibel dari para informan, serta dokumentasi sebagai bukti pendukung seperti catatan, rekaman, dan foto kegiatan penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data untuk menyederhanakan dan memfokuskan informasi, penyajian data dalam bentuk narasi atau visualisasi agar mudah dipahami, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi sebagai tahap akhir untuk menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SD Inpres Jagebob IX, temuan penelitian dianalisis menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang meliputi empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Keempat indikator ini menjadi dasar dalam menilai sejauh mana implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dapat berjalan secara efektif di lingkungan sekolah.

Pada aspek **komunikasi**, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyampaian kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar telah

dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke melalui kegiatan sosialisasi kepada kepala sekolah dan pengawas. Informasi terkait kebijakan tersebut kemudian diteruskan oleh kepala sekolah kepada para guru di SD Inpres Jagebob IX. Hal ini menunjukkan bahwa secara struktural, alur komunikasi kebijakan telah berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan mekanisme birokrasi yang berlaku. Para guru pada umumnya telah memahami adanya perubahan kurikulum dari Kurikulum 2013 menuju Kurikulum Merdeka. Namun demikian, implementasi di tingkat kelas masih bersifat parsial, di mana tidak semua kelas menerapkan kurikulum tersebut secara menyeluruh, melainkan masih terdapat kombinasi antara Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun komunikasi kebijakan telah tersampaikan, proses internalisasi dan implementasi masih berlangsung secara bertahap, tergantung pada kesiapan masing-masing guru dan kelas.

Di sisi lain, komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua/wali murid masih belum optimal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sosialisasi kepada orang tua hanya dilakukan satu kali dan tidak disertai dengan penjelasan yang mendalam, sehingga sebagian besar orang tua belum memahami secara utuh konsep dan mekanisme Kurikulum Merdeka. Bahkan, terdapat kecenderungan orang tua bersikap pasif dan menyerahkan sepenuhnya proses pendidikan kepada pihak sekolah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi antara institusi pendidikan dan masyarakat, yang berpotensi mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, terutama dalam mendukung proses pembelajaran siswa di rumah.

Pada aspek **komunikasi**, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses transmisi kebijakan dari Dinas Pendidikan kepada sekolah telah berjalan secara formal melalui kegiatan sosialisasi kepada kepala sekolah dan pengawas. Hal ini mengindikasikan bahwa secara struktural tidak terdapat hambatan signifikan dalam penyampaian kebijakan pada level atas. Namun, jika dianalisis lebih dalam, efektivitas komunikasi pada level implementasi (*street-level bureaucracy*) masih belum optimal. Hal ini terlihat dari adanya variasi pemahaman dan penerapan di kalangan guru, di mana sebagian telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara penuh, sementara yang lain masih menggabungkannya dengan Kurikulum 2013. Kondisi ini menunjukkan adanya distorsi komunikasi sebagaimana dijelaskan oleh Edward III, bahwa pesan kebijakan yang tidak disampaikan secara konsisten dan jelas akan menyebabkan perbedaan interpretasi di tingkat pelaksana.

Selain itu, komunikasi antara sekolah dan orang tua siswa juga menunjukkan kelemahan yang cukup signifikan. Minimnya frekuensi sosialisasi dan keterbatasan penyampaian informasi menyebabkan rendahnya pemahaman orang tua terhadap substansi Kurikulum Merdeka. Dalam perspektif implementasi kebijakan, kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi belum memenuhi prinsip *clarity* dan *consistency*, sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan pendidikan. Padahal, dalam

konteks pendidikan dasar, keterlibatan orang tua merupakan faktor penting dalam menunjang keberhasilan pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih partisipatif dan berkelanjutan, seperti forum diskusi rutin, penggunaan media komunikasi lokal, serta pendekatan berbasis komunitas.

Pada indikator **sumber daya**, penelitian menemukan bahwa ketersediaan sumber daya di SD Inpres Jagebob IX masih tergolong terbatas, baik dari segi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Jumlah tenaga pendidik yang terbatas, ditambah dengan kondisi beberapa guru yang tidak aktif secara optimal, menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek (P5). Selain itu, keterampilan guru dalam mengembangkan metode pembelajaran kreatif juga masih terbatas, sehingga dalam praktiknya guru cenderung bergantung pada referensi dari internet tanpa melakukan adaptasi sesuai kondisi lokal.

Keterbatasan fasilitas dan bahan ajar juga menjadi hambatan signifikan. Banyak bahan praktik yang diperlukan dalam pembelajaran tidak tersedia di lingkungan sekitar sekolah dan harus diperoleh dari kota dengan biaya yang relatif mahal. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan pihak sekolah, tetapi juga membebani orang tua/wali murid yang sebagian besar memiliki penghasilan tidak tetap. Akibatnya, pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek sering kali tidak berjalan optimal dan bahkan menimbulkan tekanan ekonomi bagi keluarga siswa. Meskipun demikian, terdapat upaya dari pihak guru untuk mencari solusi alternatif, seperti menggunakan bahan sederhana atau mengganti tugas praktik dengan tugas tertulis. Namun, solusi ini belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan yang ada secara menyeluruh.

Selanjutnya, pada indikator **disposisi atau sikap pelaksana**, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum terdapat sikap positif dari para pelaksana kebijakan, baik dari Dinas Pendidikan, pengawas, kepala sekolah, maupun guru. Dinas Pendidikan memberikan fleksibilitas kepada sekolah dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka tanpa tekanan administratif yang berlebihan, sehingga sekolah memiliki ruang untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Pengawas juga menunjukkan sikap suportif dengan melakukan monitoring tanpa memberikan tuntutan yang kaku.

Di tingkat sekolah, kepala sekolah menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap implementasi Kurikulum Merdeka, bahkan berinisiatif untuk menyediakan beberapa kebutuhan pembelajaran secara mandiri. Guru-guru juga pada dasarnya mendukung kebijakan ini karena dinilai dapat memberikan kebebasan dalam proses pembelajaran. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam hal adaptasi, terutama karena minimnya pelatihan dan pendampingan yang diberikan kepada guru. Hal ini menyebabkan sebagian guru masih mengalami kebingungan dalam menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek dan belum mampu mengoptimalkan potensi yang ada. Dengan demikian, meskipun disposisi pelaksana cenderung positif, kapasitas dan kesiapan teknis

masih perlu ditingkatkan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

Terakhir, pada indikator **struktur birokrasi**, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di SD Inpres Jagebob IX telah mengacu pada pedoman resmi pemerintah yang menekankan prinsip fleksibilitas, penguatan karakter, dan pembelajaran berbasis proyek. Struktur pengawasan juga telah berjalan melalui pembagian tugas pengawas di tingkat distrik. Sistem evaluasi yang digunakan dalam kurikulum ini bersifat lebih fleksibel, dengan penilaian berbasis capaian tahunan dibandingkan dengan sistem semester pada kurikulum sebelumnya.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala struktural, terutama terkait keterbatasan jumlah tenaga pendidik dan belum optimalnya distribusi sumber daya. Selain itu, dari perspektif orang tua, terdapat harapan agar beban tugas siswa dapat dikurangi serta biaya pendidikan, terutama untuk bahan praktik dan buku, dapat lebih terjangkau. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun struktur kebijakan telah dirancang secara fleksibel dan adaptif, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks, khususnya di daerah dengan keterbatasan sumber daya seperti SD Inpres Jagebob IX.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di SD Inpres Jagebob IX telah berjalan, namun belum optimal. Faktor komunikasi yang belum merata, keterbatasan sumber daya, kesiapan pelaksana yang masih beragam, serta kendala struktural menjadi faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Kurikulum Merdeka, khususnya di daerah 3T seperti Kabupaten Merauke.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar pada peserta didik di SD Inpres Jagebob IX, dapat disimpulkan bahwa meskipun kebijakan ini sudah di dukung oleh pihak Sekolah dan Dinas Pendidikan, pelayanannya masih menghadapi beberapa tantangan. Dalam aspek komunikasi, sosialisasi kepala sekolah dan guru telah dilakukan, namun komunikasi dengan orang tua/wali murid masih kurang efektif sehingga keterlibatan mereka dalam pembelajaran kurang maksimal. Dari aspek sumber daya, keterbatasan sumber daya yang sangat terampil serta minimnya fasilitas dan bahan ajar yang layak menjadi hambatan utama. Sikap implementator juga bervariasi, dimana kepala sekolah menunjukkan dukungan kuat, namun sebagian guru masih kesulitan menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek. Selain itu, struktur birokrasi yang kompleks dan system evaluasi berbasis proyek yang belum sepenuhnya dipahami oleh guru turut menjadi kendala dalam pelaksanaan kurikulum ini. Oleh karena itu, Walaupun Kurikulum Merdeka memiliki peluang besar untuk meningkatkan mutu pendidikan, pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan agar dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang nyata bagi para siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Edwards, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fullan, M. (2007). *The new meaning of educational change* (4th ed.). Teachers College Press.
- Kemendikbudristek. (2022). *Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI.
- Kemendikbudristek. (2021). *Merdeka belajar: Episode kebijakan pendidikan*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI.
- Kemdikbud. (2020). *Panduan pembelajaran dan asesmen pendidikan dasar dan menengah*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mulyasa, E. (2021). *Menjadi guru penggerak merdeka belajar*. Bumi Aksara.
- Nadiem, A. M. (2019). *Pidato peluncuran merdeka belajar*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- OECD. (2019). *PISA 2018 results (Volume I): What students know and can do*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/5f07c754-en>
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
- Wibowo, A. (2018). Manajemen pendidikan karakter di sekolah. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 8(2), 1–10. <https://doi.org/10.21831/jpk.v8i2.21832>
- Yamin, M., & Syahrir. (2020). Pembangunan pendidikan merdeka belajar (telaah metode pembelajaran). *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(1), 126–136. <https://doi.org/10.36312/jime.v6i1.1121>